



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA

PANGKALAN PSDKP TUAL

KUARTAL I 2025

2025



psdkp.tual



Pangkalan Psdkp Tual



PSDKP_Tual



Kata Pengantar

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nyalah Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2025 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di triwulan I Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2025 Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual (UPT Pangkalan PSDKP Tual)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Pangkalan PSDKP Tual dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Pangkalan PSDKP Tual dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tual, 15 April 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual



Erik Sosthenes, S.St.Pi, M.Si

NIP. 198503162007011006

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Tual triwulan I Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2025 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama triwulan I tahun 2025.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Pangkalan PSDKP Tual bermuara pada 9 Sasaran Kegiatan , yaitu:

1. Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif;
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif;
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan;
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan;
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif;
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
9. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2025, terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual dengan nilai NKO 104,79. Selama triwulan I Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan perhitungan atas capaian 8 indikator kinerja, dimana 13 indikator lainnya belum dilaksanakan perhitungan dan baru akan dihitung ketika semester 1 ataupun tahunan sebagaimana mekanisme penilaian terhadap indikator kinerja dimaksud. Berikut capaian atas 8 indikator kinerja:

1. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan;
2. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan;
3. Indeks peneraan sanksi administrative bidang kelautan dan perikanan;
4. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauansumber daya kelautan dan perikanan;
5. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;
6. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual;
7. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
8. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual.

Realisasi anggaran pada triwulan I Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sebesar 13,90% atau sebesar Rp**5,768,821,190,-** (*Lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah*) dari alokasi anggaran Rp**41,512,621,000,-** (*Empat puluh satu miliar lima ratus dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah*), dimana terdapat PNPB pada TA. 2025 sebesar Rp**6,603,165,000,-** (*Enam miliar enam ratus tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*), melalui laporan kinerja triwulan I tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja guna mendorong pencapaian target pada tahun berikutnya.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Maksud dan Tujuan	9
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9
D. Data Umum Organisasi	10
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	14
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA	15
A. Kegiatan Pengawasan SDKP	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
C. Pengukuran Capaian Kinerja	17
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025	18
1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Tual Triwulan I Tahun 2025	18
2. Capaian Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 Tahunan	18
B. Analisis Pencapaian Kinerja	20
1. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	20
2. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	24
3. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	29
4. Sasaran kinerja 8: Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	36
5. Sasaran kinerja 9: Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	36
C. Realisasi Anggaran	42
BAB IV	43
PENUTUP	43



A.	Kesimpulan.....	43
B.	Saran dan Rekomendasi.....	43

Daftar Tabel

Tabel 1 Data Armada.....	13
Tabel 2. Komposisi Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan Unit Kerja	14
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025	16
Tabel 4 Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Triwulan I Tahun 2025	19
Tabel 5 Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Triwulan I Tahun 2025.....	20
Tabel 6 Pemeriksaan rutin OSS.....	21
Tabel 7 Pengawasan rutin selain OSS.....	21
Tabel 8 Pengawasan insidental.....	21
Tabel 9 Capaian IK 4.....	21
Tabel 10 Rekapitulasi pengawasan SDK.....	23
Tabel 11 Rekapitulasi pengawasan pemanfaatan ruang laut.....	24
Tabel 12 Nilai kualitas pemeriksaan setiap pelaku usaha.....	25
Tabel 13 Capaian IK 5.....	25
Tabel 14 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan I per lokasi	27
Tabel 15 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan I per bulan	27
Tabel 16 Rekap pengawasan budidaya	28
Tabel 17 Capaian IK 9.....	30
Tabel 18 Rekap pengenaan sanksi administratif non SPKP	31
Tabel 19 Rekap pengenaan sanksi administratif SPKP.....	33
Tabel 20 Rekapitulasi SPKP	35
Tabel 21 Capaian IK 10.....	35
Tabel 22 Capaian IK 16.....	38
Tabel 23 Capaian IK 17.....	39
Tabel 24 Capaian IK 20.....	41
Tabel 25 Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual Periode Triwulan I 2025.....	43

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Tual.....	12
Gambar 2 Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.....	12
Gambar 3 Sistematisa Penyusunan LKj Pangkalan PSDKP Tual	14
Gambar 4 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Pangkalan PSDKP Tual	18
Gambar 5 Dokumentasi Pengawasan Ruang Laut.....	23
Gambar 6 Pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan	27
Gambar 7 Pengawasan budidaya	28
Gambar 8 Ekspose penetapan sanksi administratif.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) triwulan I, UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap Tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap Tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- Masih terdapat kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);
- Kegiatan *transshipment* yang dilakukan kapal-kapal tidak sesuai mitra yang tercantum pada dokumen perizinan;
- Kapal perikanan yang melakukan migrasi perizinan belum sepenuhnya melengkapi armada penangkapan dengan VMS;
- Terdapat kapal perikanan yang memiliki perizinan yang tidak sesuai dengan wilayah operasi;
- Kegiatan *destructive fishing* baik pengeboman dan pembiusan yang masih sering terjadi serta minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait jenis ikan yang dilindungi;

- f. Sering terjadi kegiatan operasi penangkapan ikan yang dilakukan kapal ikan Indonesia (KII) di wilayah perairan Papua New Guinea.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik terutama kapal angkut ikan hidup dengan ukuran ≤ 30 GT yang tidak menggunakan VMS;
- b. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPR.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Masih banyaknya UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP;
- b. Terdapat unit usaha yang telah berizin tapi belum melaksanakan aktifitas pengolahan.

4. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom* serta kejadian kapal kandas yang masih sering terjadi di wilayah konservasi
- b. Eksploitasi mangrove.
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan PSDKP Tual menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Penyiapan logistik dan pemeliharaan serta operasi kapal pengawas;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan

g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

a. Kepala Pangkalan:

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

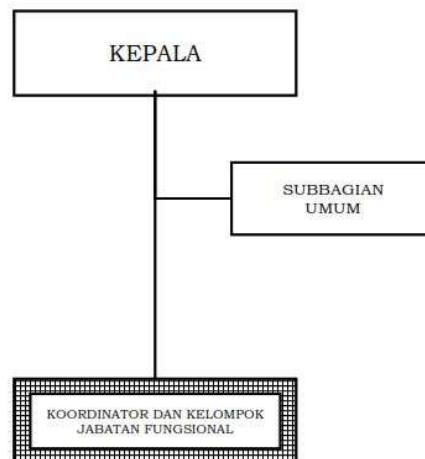
b. Kepala Subbagian Umum:

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

STRUKTUR ORGANISASI PANGKALAN PSDKP TUAL

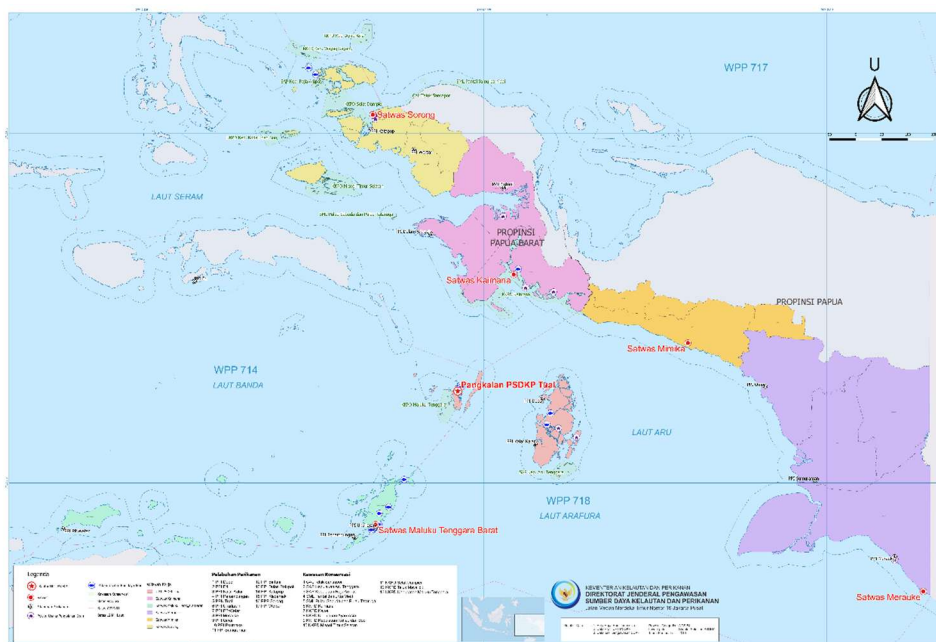


Gambar 1 Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Tual

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi 5 Provinsi (Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan) dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 714, WPP 715, WPP 718.

Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2 Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual

Dalam pelaksanaan operasional pengawasan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual memiliki satwas dan wilker yang berada dalam kontrol Pangkalan PSDKP sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

Pangkalan PSDKP Tual

- Wilker PSDKP Dobo
- Wilker PSDKP Warabal

1) Satuan Pengawasan SDKP Maluku Tenggara Barat (MTB)

- Wilker PSDKP Kisar

2) Satuan Pengawasan SDKP Sorong

- Wilker PSDKP Sorong Selatan
- Wilker PSDKP Raja Ampat

3) Satuan Pengawasan SDKP Kaimana

- Wilker PSDKP Fak Fak
- Wilker PSDKP Wimro / Teluk Bintuni
- Wilker PSDKP Avona

4) Satuan Pengawasan SDKP Mimika

5) Satuan Pengawasan SDKP Merauke

- Wilker PSDKP Wanam
- Wilker PSDKP Asmat

4. Armada Pengawas dan *Speedboat* Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual

Pangkalan PSDKP Tual dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Berikut data kapal pengawas, *speedboat* pengawas dan RIB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1 Data Armada

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Lokasi / Pangkalan	Kondisi
1	Hiu 14	32 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
2	Hiu Macan 06	36 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
3	Sea Rider	8 meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
4	Rubber Boat	5 meter	Wilker Raja Ampat	Siap Operasi
5	Albacore 002	16 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
6	Napoleon 025	12 Meter	Satwas SDKP Mimika	Siap Operasi
7	Napoleon 042	12 Meter	Wilker Raja Ampat	Siap Operasi
8	Napoleon 049	12 Meter	Wilker PSDKP Warabal	Siap Terbatas
9	Napoleon 050	12 Meter	Satwas SDKP MTB	Siap Operasi
10	Napoleon 018	12 Meter	Satwas SDKP Sorong	Siap Operasi
11	Marlin 014	6 Meter	Wilker PSDKP Fak Fak	Siap Operasi
12	Jetski 1	3 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
13	Jetski 2	3 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi

Sumber: Bagian Operasi Armada Pangkalan PSDKP Tual

5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sampai Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 143 orang, yang terdiri dari PNS Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 82 orang, 9 orang PPPK dan tenaga kontrak sebanyak 52 orang, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	PNS	PPPK	PPNPN	Jumlah
1	Pangkalan Pengawasan SDKP Tual	28	2	29	59
	- Wilker Pengawasan SDKP Dobo	2	-	3	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Warabal	-	-	2	2
2	Satuan Pengawasan SDKP Sorong	8	-	3	11
	- Wilker Pengawasan SDKP Sor Sel	-	-	-	-
	- Wilker Pengawasan SDKP Raja Ampat	2	-	1	3
3	Satwas Pengawasan SDKP Merauke	9	-	2	11
	- Wilker Pengawasan SDKP Wanam	-	-	-	-
4	Satuan Pengawasan SDKP Maluku Tenggara Barat	3	-	1	4
	- Wilker Pengawasan SDKP Kisar	-	-	-	-
5	Satuan Pengawasan SDKP Kaimana	2	-	3	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Wimro	-	-	1	1
	- Wilker Pengawasan SDKP Fak Fak	2	-	2	4
6	Satuan Pengawasan SDKP Mimika	5	-	2	7
	- Wilker Pengawasan SDKP Asmat	-	-	-	-
7	KP. Hiu Macan 06	11	3	2	16
8	KP. Hiu 14	7	3	1	11
9	KP. Macan Tutul 01	-	1	-	1
10	Tugas Belajar	3	-	-	3
	Total	82	9	52	143

Sumber: Kepegawaian Sub Bagian Umum Pangkalan PSDKP Tual

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Tual berdasarkan Permen KP nomor 35 tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3 Sistematika Penyusunan LKj Pangkalan PSDKP Tual

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Kegiatan Pengawasan SDKP

Rumusan kegiatan tingkat UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pangkalan PSDKP Tual.

Selain kegiatan di atas Pangkalan PSDKP Tual juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Tual dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif	1.	Indeks kualitas pembinaan pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2.	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (nilai)	75
		3.	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4.	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5.	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6.	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7.	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8.	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
7.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10.	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11.	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	94
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12.	Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	71,5
		13.	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	92
		14.	Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	81
		15.	Penilaian mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	86
		16.	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
		17.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18.	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	88,5
		19.	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	80
		20.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	1
		21.	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	70

Selama triwulan I tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan 1 kali revisi perjanjian kinerja pada tanggal 17 Maret 2025 yang merupakan perubahan atas kepala Pangkalan PSDKP Tual. Perjanjian Kinerja awal maupun revisi Pangkalan PSDKP Tual tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran I.

C. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

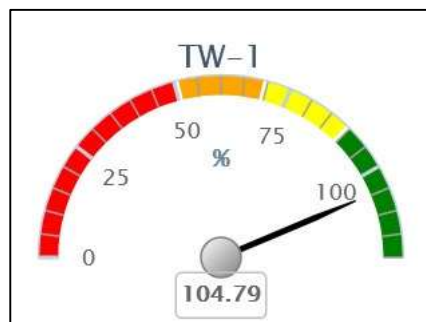
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Tual Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025, Pangkalan PSDKP Tual telah menyempurnakan dan menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja yang terdiri atas 11 IKU dan 10 IKM. Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Pangkalan PSDKP Tual sebesar 104,79% untuk triwulan I.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 4 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Pangkalan PSDKP Tual

Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Pangkalan PSDKP Tual dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 8 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 Tahunan

Capaian kinerja triwulan I Tahun 2025 mendapat hasil yang baik dengan NPSK dengan kategori baik dengan perolehan diatas 100%. Capaian triwulan I Pangkalan PSDKP Tual ditabulasikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4 Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2025	Target MARET	Capaian MARET	%
S.01	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif						
IKS.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	Indeks	Maximize	82	0		
S.02	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif						
IKS.02.1	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (nilai)	Nilai	Maximize	75	0		
IKS.02.2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (nilai)	Nilai	Maximize	75	0		
S.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan					100	
IKS.03.1	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	Indeks	Maximize	100	100	100	100
S.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan					100	
IKS.04.1	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	Indeks	Maximize	100	100	100	100
S.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif						
IKS.05.1	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	92	0		
IKS.05.2	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	92	0		
S.06	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						
S.07	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan					120	
IKS.07.1	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	Indeks	Maximize	81	65	81	120
IKS.07.2	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	Indeks	Maximize	81	65	81	120
S.08	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan					100	
IKS.08.1	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	Indeks	Maximize	94	65	65	100
S.09	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					103,97	
IKS.09.1	Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	71,5	0		
IKS.09.10	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	Nilai	Maximize	70	0		
IKS.09.2	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	92	0		
IKS.09.3	Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	Indeks	Maximize	81	0		
IKS.09.4	Penilaian mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	86	0		
IKS.09.5	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	%	Maximize	100	100	100	100
IKS.09.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	%	Maximize	95	95	100	105,26
IKS.09.7	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	88,5	88,5	93,22	105,33
IKS.09.8	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	80	0		
IKS.09.9	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	Inovasi	Maximize	1	0		

Pada triwulan I tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual dalam aktualisasinya telah melaksanakan penilaian terhadap 8 IK dengan kriteria 6 IK dengan predikat baik, 2 IK dengan predikat istimewa. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang triwulan I tahun 2025. Realisasi anggaran pada triwulan I Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sebesar 13,90% atau sebesar **Rp5,768,821,190,-** (*lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus*

dua puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dari alokasi anggaran Rp**41,512,621,000,-** (empat puluh satu miliar lima ratus dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Tabel 5 Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Triwulan I Tahun 2025

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	2350 Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	PAGU	0	17,997,404,000	1,366,000,000	0	0	0	0	0	0	19,363,404,000
		REALISASI	0.00%	1,455,089,764 (8.08%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,455,089,764 (7.51%)
		SISA	0	16,542,314,236	1,366,000,000	0	0	0	0	0	0	17,908,314,236
2	2351 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	PAGU	0	256,615,000	0	0	0	0	0	0	0	256,615,000
		REALISASI	0.00%	7,909,357 (3.08%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,909,357 (3.08%)
		SISA	0	248,705,643	0	0	0	0	0	0	0	248,705,643
3	2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	PAGU	0	1,737,869,000	72,000,000	0	0	0	0	0	0	1,809,869,000
		REALISASI	0.00%	23,177,520 (1.33%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23,177,520 (1.28%)
		SISA	0	1,714,691,480	72,000,000	0	0	0	0	0	0	1,786,691,480
4	2353 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	PAGU	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
		REALISASI	0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
5	2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Dijeri Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	PAGU	11,668,752,000	8,130,211,000	183,770,000	0	0	0	0	0	0	19,982,733,000
		REALISASI	2,921,025,597 (25.03%)	1,331,199,402 (16.37%)	30,419,550 (16.55%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,282,644,549 (21.43%)
		SISA	8,747,726,403	6,799,011,598	153,350,450	0	0	0	0	0	0	15,700,088,451
GRAND TOTAL			PAGU	11,668,752,000	28,222,099,000	1,621,770,000	0	0	0	0	0	41,512,621,000
			REALISASI	2,921,025,597 (25.03%)	2,817,376,043 (9.98%)	30,419,550 (1.88%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	5,768,821,190 (13.90%)
			SISA	8,747,726,403	25,404,722,957	1,591,350,450	0	0	0	0	0	35,743,799,810

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Triwulan I Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Sasaran Kegiatan ketiga menghasilkan 1 indikator kinerja utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)".

a. IK 4: Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)

Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu. Formula dalam menghitung capaian indikator kinerja indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan dijabarkan sebagai berikut.

$$X = (a \times 45\%) + (b \times 40\%) + (c \times 15\%)$$

Keterangan:

- X : Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
 a : Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin OSS
 b : Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin selain OSS
 c : Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental

Tabel 6 Pemeriksaan rutin OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Rencana Pengawasan Tahunan (5) • Surat Tugas Kunjungan Lapangan (10)
2	Pelaksanaan	65	• Berita Acara Pengawasan (30) • Berita Acara Pemeriksaan dari OSS (35)
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tabel 7 Pengawasan rutin selain OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Rencana Pengawasan Tahunan (5) • Surat Tugas (5) • Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)
2	Pelaksanaan	65	• Berita Acara Pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tabel 8 Pengawasan insidental

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Surat Tugas (7.5) • Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (7.5)
2	Pelaksanaan	65	• Berita Acara Pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tabel 9 Capaian IK 4

Indikator Kinerja				Target		Realisasi		
				TW I	2025	TW I	s/d	TW I
						2025	TW I	2024
Indeks	pemeriksaan	pelaku	usaha	100	100	100	100	-
kelautan (indeks)								

Dari tabel di atas dapat kita lihat jika capaian kinerja untuk IK indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan selama triwulan I telah optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. IK ini merupakan IK baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan IK tahun sebelumnya.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Tual agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misalnya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
4. Melakukan *sharing session* dengan instansi terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih profesional dan bertanggungjawab terutama dalam penentuan luasan wilayah pemanfaatan dalam pengawasan ruang laut;
5. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Selama triwulan I pengawasan sumber daya kelautan yang telah dilaksanakan hanya pada pengawasan ruang laut. Realisasi pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan sebesar 42,12% atau sebesar Rp19,773,605 dari total anggaran sebesar Rp46,944,000 pagu tersedia yang mana jumlah pagu tersebut adalah pagu setelah efisiensi.

Tabel 10 Rekapitulasi pengawasan SDK

No	Unit Pelaksana Teknis	Jumlah Unit/Pelaku Usaha diperiksa Tahun 2025								Jumlah Pelaku Usaha		
		KKPN		PWP3K		PRL		PENCEMARAN		Taat	Tidak Taat	Total
		Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat			
1	Pangkalan PSDKP Tual									0	0	0
2	Wilker PSDKP Dobo									0	0	0
3	Satwas SDKP Sorong					2				2	0	2
4	Wilker PSDKP Raja Ampat									0	0	0
5	Satwas SDKP Merauke									0	0	0
6	Satwas SDKP Kaimana									0	0	0
7	Wilker PSDKP Fak-Fak									0	0	0
8	Satwas SDKP Mimika									0	0	0
9	Satwas SDKP MTB					1				1	0	1
Jumlah		0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3
		0		0		3		0		3		

a.1 Pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut.

Pencapaian kinerja triwulan I Tahun 2025 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 3 pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan terhadap ruang laut. Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri, dimana PKKPR adalah perizinan dasar, selama pelaku usaha memanfaatkan ruang laut. pengawasan PKKPR erat kaitannya dengan pengawasan budidaya dan pengawasan perikanan lainnya sehingga kedudukan perizinan PKKPR sangat urgent diawasi untuk memastikan kelaikan dokumen lainnya.



Gambar 5 Dokumentasi Pengawasan Ruang Laut

Tabel 11 Rekapitulasi pengawasan pemanfaatan ruang laut

NO	TANGGAL PENGAWASAN	LOKASI PENGAWASAN	PELAKU USAHA	Nomor PKKPRL Terbit/PKKPRL	KEYATAAN TAAT/ TIDAK	URAIAN	REKOMENDASI
1. PANGKALAN PSDKP TUAL							
2. SATUAN PSDKP MALUKU YENGGARA BARAT							
1	13 Maret 2025	Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.	Nama Pelaku Usaha : PT. Mina Timur Indonesia Nama Penanggungjawab : Claudio Cangia NIB : 9120202111174 Jenis Kegiatan Usaha : KBLU 10213 (Industri Pembekuan Ikan) KBLU 10299 (Industri Pembekuan Biotik Air Lainnya) KBLU 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) Detail Kegiatan : Demaga Tambak Labuh Kapal Lokasi : Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Titik Koordinat : 07°54'42"S 131°20'29"E Luas pemanfaatan : 0,92 Ha (Sesuai PKKPRL) NPWP : 31.684.434.9-807.001 Status Modal : PMDN Tanggal Penerbitan PKKPRL : 17 Januari 2019 PKKPRL : 221240518100020 Instansi Penerbit : Menteri Investasi dan Kepala BKPM	Tanggal Penerbitan PKKPRL : 17 Januari 2019 PKKPRL : 221240518100020 Titik Koordinat : 07°54'42"S 131°20'29"E Luas pemanfaatan : 0,92 Ha (Sesuai PKKPRL)	v	Dari hasil inspeksi lapangan saat ini belum ditemukan adanya dugaan terjadinya pelanggaran di bidang pemanfaatan ruang laut karena mengingat Pembangunan demaga belum selesai dibuat. Pengawasan selanjutnya akan dilakukan pada saat Pembangunan demaga tambak labuh kapal telah selesai dilakukan.	Disampaikan juga kepada pelaku usaha agar memperhatikan kondisi ekosistem perairan di sekitar dan tidak melakukan kegiatan pencemaran laut yaitu hasil pembangunan sampah/limbah kegiatan Perusahaan.
3. SATUAN PSDKP SORONG							
1	20 Februari 2025	Sebel Dampar, Papua Barat	Nama Pelaku Usaha : JULIO FRANCO SUTRISNO NIB : 1802200035271 Jenis Kegiatan Usaha : KBLU 43120 (Penyiapan Lahan) KBLU 56101 (Restoran) Detail Kegiatan : Rumah Makan dan Demaga Wisata Lokasi : Sebel Dampar, Provinsi Papua Barat. Titik Koordinat : I. 131° 14'48,139" BT - 0°50'53,429" LS II. 131° 14'36,337" BT - 0°51'1,691" LS III. 131° 14'36,644" BT - 0°51'2,155" LS IV. 131° 14'34,282" BT - 0°51'3,033" LS V. 131° 14'32,461" BT - 0°51'0,174" LS VI. 131° 14'33,810" BT - 0°50'59,297" LS VII. 131° 14'34,117" BT - 0°50'59,776" LS VIII. 131° 14'44,180" BT - 0°50'53,236" LS Luas pemanfaatan : 3,43 Ha Status Usaha : Usaha Kecil Tingkat Risiko : Tinggi NPWP : 94.508.649.4-026.000 Status Modal : PMDN Tanggal Penerbitan PKKPRL : 9 Januari 2023 PKKPRL : 09012310519200002 Instansi Penerbit : ah MEN.KP- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Tanggal Penerbitan PKKPRL : 9 Januari 2023 PKKPRL : 09012310519200002 Titik Koordinat : I. 131° 14'36,337" BT - 0°51'1,691" LS II. 131° 14'36,644" BT - 0°51'2,155" LS III. 131° 14'34,282" BT - 0°51'3,033" LS IV. 131° 14'32,461" BT - 0°51'0,174" LS V. 131° 14'33,810" BT - 0°50'59,297" LS VI. 131° 14'34,117" BT - 0°50'59,776" LS VII. 131° 14'44,180" BT - 0°50'53,236" LS Luas pemanfaatan : 3,43 Ha	v	Dari hasil analisa data yang ada dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut : 1. Pemanfaatan ruang laut oleh usaha perikanan Julio Franco Sutrisno sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tidak ditemukan pelanggaran dan kondisi lingkungan disekitar lokasi usaha terapan baik.	1. Perlu koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan reklamasi yang dilakukan didalam zona di luar kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Perlu peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan.
2	24 Februari 2025	Il. Obel Malibus No. 999 Distrik Maladumes Kelurahan Saeka, Kota Sorong Prov Papua Barat Daya	Nama Pelaku Usaha : PT. Papua Resort NIB : 0230000093044 Jenis Kegiatan Usaha : Restoran Detail Kegiatan : Wisata Bahari Lokasi : Il. Obel Malibus No. 999 Distrik Maladumes Kelurahan Saeka, Kota Sorong Prov Papua Barat Daya Titik Koordinat : I. 131° 15'54,684" BT - 0°48'38,206" LS II. 131° 15'54,839" BT - 0°48'38,176" LS III. 131° 15'56,428" BT - 0°48'36,925" LS IV. 131° 16'0,125" BT - 0°48'41,227" LS V. 131° 15'56,370" BT - 0°48'42,509" LS Luas pemanfaatan : 1,87 Ha Kedalaman : 4 meter. NPWP : 03.082.758.8-051.000 Status Modal : PMA Tanggal Penerbitan PKKPRL : 30 Desember 2022 PKKPRL : 30122210519200001 Instansi Penerbit : ah MEN.KP- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Tanggal Penerbitan PKKPRL : 30 Desember 2022 PKKPRL : 30122210519200001 Titik Koordinat : I. 131° 15'54,684" BT - 0°48'38,206" LS II. 131° 15'54,839" BT - 0°48'38,176" LS III. 131° 15'56,428" BT - 0°48'36,925" LS IV. 131° 16'0,125" BT - 0°48'41,227" LS V. 131° 15'56,370" BT - 0°48'42,509" LS Luas pemanfaatan : 1,87 Ha	v	Dari hasil analisa data yang ada dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut : 1. Pemanfaatan ruang laut oleh usaha perikanan PT. Papua Resort sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. PT. Papua Resort belum membuat laporan tahunan pemanfaatan ruang laut. 3. Kondisi perairan disekitar lokasi PT. Papua Resort terapan dalam kondisi baik.	Berolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut : 1. Perlu koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut agar kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. 2. Perlu peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan. 3. PT. Papua Resort dituntut untuk menyampaikan laporan tahunan melalui aplikasi e-sa.kkp.go.id.

2. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan

Sasaran kegiatan terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan menurunkan 1 indikator kinerja utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan". IK ini mengalami perubahan nama akan tetapi mekanisme perhitungannya tetap sama dengan IK tahun sebelumnya.

a. IK 5: Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan

Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan merupakan nilai rata-rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa.

Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formula:

$$x_{riksa} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

Xriksa : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

Xi : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i

n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Tabel 12 Nilai kualitas pemeriksaan setiap pelaku usaha

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	20	Laporan kepatuhan, dan/atau tindaklanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi Terbit
Jumlah Nilai		100	

Tahun 2025 capaian IKU ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 100, sebagaimana target triwulan yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13 Capaian IK 5

Indikator Kinerja				Target		Realisasi		
				TW I	2025	TW I	s/d	TW I
						2025	TW I	2024
Indeks	pemeriksaan	pelaku	usaha	100	100	100	100	100
perikanan								

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan instrumen pengawasan. Indikator kinerja ini memberikan batasan sehingga pengawasan yang merupakan tujuan utama dari organisasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak hanya merujuk kepada kaidah pengawaan akan tetapi tertib dalam pengadministrasian.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Tual agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misalnya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
2. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
3. Melakukan *sharing session* dengan instansi terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih profesional dan bertanggungjawab;
4. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Realisasi anggaran selama triwulan I tahun 2025 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp7,865,520,- atau 8,20% dari pagu sebesar Rp95,888,000 -. Pagu tersebut merupakan pagu setelah efisiensi dilaksanakan.

a.1 Pengawasan kapal penangkap ikan

Hingga triwulan I Pangkalan PSDKP Tual belum melaksanakan pengawasan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan. Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap kesesuaian fisik dan dokumen kapal dalam rangka penerbitan SLO dan selama kurun waktu triwulan I Pangkalan PSDKP tual telah menerbitkan 2.155 SLO dengan rincian sebagai berikut

Tabel 14 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan I per lokasi

No	Lokasi (UPT/Satuan/Wilker PSDKP)	Izin Pusat (>30 GT)			Izin Provinsi (11-30 GT)			Izin Provinsi (≤10 GT)			Jumlah Total			% Laik	Jumlah Kapal Laik Operasi	Jumlah Kapal Tidak Laik / SKP SLO
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO			
		D	B		D	B		D	B		D	B				
1	PANGKALAN PSDKP TUAL	53	59	59	23	22	22	-	-	-	76	81	81	100,00	81	-
2	WILKER PSDKP DOBO	224	284	271	146	117	69	1	-	2	371	403	342	84,86	342	61
3	WILKER PSDKP WARABAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SATUAN PSDKP SORONG	39	40	40	910	864	864	260	251	251	1.209	1.155	1.155	100,00	1.155	-
5	WILKER PSDKP SORONG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	WILKER PSDKP RAJAAMPAT	14	14	14	-	-	-	-	-	-	14	14	14	100,00	14	-
7	SATUAN PSDKP MERAUKE	48	84	83	147	222	222	-	-	-	195	306	305	99,67	305	1
8	WILKER PSDKP ASMAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	WILKER PSDKP WANAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SATUAN PSDKP KAIMANA	20	13	13	62	63	63	-	-	-	82	76	76	100,00	76	-
11	WILKER PSDKP FAKFAK	3	3	3	14	12	12	-	-	-	17	15	15	100,00	15	-
12	WILKER PSDKP WIMRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SATUAN PSDKP MIMIKA	42	132	129	14	22	20	-	-	-	118	154	149	96,75	149	5
14	SATUAN PSDKP MTB	15	14	14	4	4	4	-	-	-	19	18	18	100,00	18	-
15	WILKER PSDKP KISAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WILKER PSDKP BENJINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		458	643	626	1.320	1.326	1.276	261	253	253	2.101	2.222	2.155	96,98	2.155	67

Tabel 15 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan I per bulan

No	Bulan	Izin Pusat (>30 GT)			Izin Provinsi (11-30 GT)			Izin Provinsi (≤10 GT)			Jumlah Total			% Laik	Jumlah Kapal Laik Operasi	Jumlah Kapal Tidak Laik / SKP SLO
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO			
		D	B		D	B		D	B		D	B				
1	JANUARI	144	308	304	423	500	489	85	96	96	714	904	889	98,34	889	15
2	FEBRUARI	103	152	150	409	454	438	91	84	84	603	690	672	97,39	672	18
3	MARET	211	183	172	488	372	349	85	73	73	784	628	594	94,59	594	34
JUMLAH		458	643	626	1.320	1.326	1.276	261	253	253	2.101	2.222	2.155	96,98	2.155	67



Gambar 6 Pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan

a.2 Pengawasan kegiatan budidaya perikanan

Pengawasan terhadap budidaya dilaksanakan selama triwulan I Tahun 2025 kepada 1 pelaku usaha yang dilakukan secara insidental. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 16 Rekap pengawasan budidaya

No	Tanggal Pengawasan	Nama Perusahaan/Perorangan	NIB	Provinsi	Kode KBLI	Dokumen Perizinan Berusaha
1	24/02/2025	PT Yellu Mutiara	8120104842988	Papua Barat Daya	03215	UKL-UPL, Izin lokasi, CPIB



Gambar 7 Pengawasan budidaya

3. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang berorientasi kepada penguasaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan menurunkan 2 indikator kinerja utama, IKU tersebut antara lain:

1. Indeks penguasaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan;
2. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

a. IK 9: Indeks penguasaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indeks penguasaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan penguasaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Pangkalan PSDKP Tual untuk penguasaan sanksi atas pelanggaran SPKP dan pelanggaran perizinan berusaha dibidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah.

Indeks Penguasaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$x = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$$

x : Indeks penguasaan sanksi administratif bidang KP

a : Jumlah penguasaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama

b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

dengan kriteria indeks

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik

Pangkalan PSDKP Tual memperoleh nilai 81 atas IK ini berdasarkan perhitungan di atas. Total pangkalan PSDKP Tual menetapkan 21 kasus non SPKP dan 41 kasus SPKP, dengan perolehan denda administratif sebesar Rp572.940.800,-.

Tabel 17 Capaian IK 9

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2025	TW I 2025	s/d TW I	TW I 2024
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	65	81	81	81	80

Analisa penyebab keberhasilan IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan, awak kapal pengawas, maupun polsus PWP3K yang melaksanakan tugas agar profesional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan secara internal sebagai bagian penguatan kompetensi dan sharing session;
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti ketika melaksanakan pengawasan baik ketika kedatangan kapal, keberangkatan kapal, pengawasan perizinan berusaha maupun pemeriksaan ketika sedang melaksanakan gelar operasi.
3. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;

Analisa kegiatan yang menunjang

1. Metode ekspose eksternal yang melibatkan berbagai pihak sehingga penetapan sanksi lebih valid dan terukur;
2. pengumpulan data pengawasan yang kredibel sehingga bukti awal dapat dikembangkan hingga adanya penetapan denda.

Realisasi anggaran yang diserap selama triwulan I terhadap kegiatan ini sebesar Rp7,555,757,- (42,5%) dari jumlah pagu setelah efisiensi sebesar Rp17,779,000,-.

Tabel 18 Rekap pengenalan sanksi administratif non SPKP

No.	Nama Kapal (GT)	Pelaku Usaha/ Perorangan			Pemeriksa		Pelanggaran	Proses Penanganan				
		Nama	Peran	Nahkoda	Unit Kerja yang Menangani	Kapal		Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Nomor Surat Penetapan Sanksi Administratif	Tanggal Surat Penetapan Sanksi Administratif	Jumlah Denda Administratif (Rp)
1	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21
1	REZEKI ABADI (GT. 79)	REJEKI SAMUDERA MAKMUR, PT	Pemilik	SUANDI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan kegiatan penangkapan di jalur penangkapan ikan II sekitar Pulau Dolak Laut Arafuru WPPNRI 718 yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha yang dimiliki	Denda Administratif	B.92/DJPSDKP/PW.340/I/2025	31 Januari 2025	29.577.600	05 Februari 2025
2	MAHATAN ARUJAYA 21 (250)	SAMUDRA MAS GRUP, PT	Pemilik	JAFAR MUADIS	Pangkalan PSDKP Tual	KP HIU MACAN 06	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Kepulauan Aru WPPNRI 718 menggunakan Alat Penangkapan Ikan berupa Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) dengan mesh size dibawah ukuran serta tidak memasang TED (Turtle Excluder Devices) sehingga tidak memenuhi Perizinan Berusaha yang dimiliki	Denda Administratif	B.124/DJPSDKP/PW.110/II/2025	07 Februari 2025	118.800.000	07 Februari 2025
3	KUSUMA 109 (GT. 236)	SAMUDRA MAS GRUP, PT	Pemilik	WELM HURSEPUNY	Pangkalan PSDKP Tual	KP HIU MACAN 06	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Kepulauan Aru WPPNRI 718 menggunakan Alat Penangkapan Ikan berupa Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) dengan mesh size dibawah ukuran serta tidak memasang TED (Turtle Excluder Devices) sehingga tidak memenuhi Perizinan Berusaha yang dimiliki	Denda Administratif	B.125/DJPSDKP/PW.110/II/2025	07 Februari 2025	112.147.200	07 Februari 2025
4	ANGELINA 66 (GT. 56)	PT. SAMUDRA SENTOSA GEMILANG	Pemilik	HUNG SENG	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transhipment ikan di laut ke KM. KARYA SAMUDRA (GT.169) yang tidak memenuhi perizinan berusaha (bukan mitranya)	Denda Administratif	B.146/DJPSDKP/PW.110/II/2025	13 Februari 2025	17.024.000	14 Februari 2025
5	TIRTA JAYA MANDIRI (GT. 29)	SIM ENG	Pemilik	SAMSI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transhipment ikan di laut ke KM. KARYA SAMUDRA (GT.169) yang tidak memenuhi perizinan berusaha (bukan mitranya)	SP1	B.377/PSDKPlan.6/PW.110/II/2025	11 Februari 2025	-	-
6	JALA SUKSES MANDIRI (GT. 75)	PT. JALA KARYA LAUTAN ABADI	Pemilik	SUYANTO	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transhipment ikan di laut ke KM. KARYA SAMUDRA (GT.169) yang tidak memenuhi perizinan berusaha (bukan mitranya)	Denda Administratif	B.159/DJPSDKP/PW.110/II/2025	18 Februari 2025	38.040.000	20 Februari 2025
7	KARYA SAMUDRA (GT. 169)	YUSDI/SAMUDRA BINTANG JAYA KARIMUN, PT	Pemilik	MARTIN	Pangkalan PSDKP Tual	-	melakukan alih muatan/transhipment Ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga yang tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.550/PSDKPlan.6/PW.110/II/2025	24 Februari 2025	-	-
8	DEWI FORTUNA (GT. 59)	ANG TJIN SIONG	Pemilik	ADI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transhipment Ikan di laut ke KM. SSG 66 (GT.491) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.760/PSDKPlan.6/PW.110/III/2025	07 Maret 2025	-	-
9	MAKMUR JAYA 8 (GT. 59)	HERRY YANTO	Pemilik	WAHYUDI	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transhipment Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehihgga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.221/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	12.036.000	13 Maret 2025
10	HARLANDO PRATAMA 3 (GT. 153)	MITRA JAYAMAHE NUSANTARA, PT	Pemilik	KAMTO	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transhipment Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehihgga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.224/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	39.474.000	13 Maret 2025
11	BINTANG SUMBER REJEKI (GT. 124)	SINAR MENTARI BAHARI, PT	Pemilik	SAKIR	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transhipment Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehihgga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.216/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	25.296.000	13 Maret 2025



12	LAUTAN BERLIAN (GT. 58)	ANITA	Pemilik	MUH. SAEFUL IRFAN	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/ <i>transshipment</i> Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.225/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	14.964.000	13 Maret 2025
13	SINAR MENTARI - IX (GT. 98)	DENI ASTRIANTO	Pemilik	TAUFIK RAMLI	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/ <i>transshipment</i> Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.220/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	19.788.000	13 Maret 2025
14	MAKMUR JAYA 98 (GT. 98)	HERRY YANTO	Pemilik	SLAMET PRIBADI	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/ <i>transshipment</i> Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.222/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	19.992.000	13 Maret 2025
15	SINAR MENTARI - 8 (GT. 97)	DENI ASTRIANTO	Pemilik	YASKURI	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/ <i>transshipment</i> Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.219/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	19.584.000	13 Maret 2025
16	UNION - II (GT. 97)	SINAR MENTARI BAHARI, PT	Pemilik	WAHIJUL HAKIM	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/ <i>transshipment</i> Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.217/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	25.026.000	13 Maret 2025
17	FAJAR NELAYAN (GT. 150)	HERMAN SANTOSO TJAHAYA	Pemilik	SLAMET	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/ <i>transshipment</i> Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.223/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	30.600.000	13 Maret 2025
18	MENTARI ANUGRAH SELATAN (GT. 82)	MENTARI ANUGRAH SELATAN, PT	Pemilik	RIKAM	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/ <i>transshipment</i> Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	.218/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	16.728.000	13 Maret 2025
19	MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298)	MATAHARI SUKSES ABADI, PT	Pemilik	DWI SUTARTO	Pangkalan PSDKP Tual	-	melakukan alih muatan/ <i>transshipment</i> Ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga yang tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.786/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	10 Maret 2025	-	-
20	KM. BAHARI ANUGERAH	LAUTAN BAHARI SEJAHTERA, PT	Pemilik	TOKHARI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/ <i>transshipment</i> Ikan di laut ke KM. APEL MERAH 2 (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.226/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	33.864.000	13 Maret 2025
21	KM. APEL MERAH 2 (GT. 289)	HARDI SUSANTO	Pemilik		Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	melakukan alih muatan/ <i>transshipment</i> Ikan di laut dari KM. BAHARI ANUGERAH yang bukan mitranya, sehingga yang tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.789/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	10 Maret 2025	-	-
TOTAL											572.940.800	

Tabel 19 Rekap pengenalan sanksi administratif SPKP

No	Tanggal	Nomor	Objek Pelaporan	Pelanggaran
1	21/01/2025	B.181/PSDKPLan.6/PW.110/I/2025	Kapal Indonesia PUTRA KENCANA - VIII NO Buku Kapal 2572	Beroperasi Dekat Garis Pantai
2	06/02/2025	B.331/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia HASIL MELIMPAH-I NO Buku Kapal 2092	Pelanggaran DPI
3	06/02/2025	B.330/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia PAHALA MELIMPAH 1 NO Buku Kapal 10226	Pelanggaran DPI
4	13/02/2025	B.399/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia SUMBER BERKAH NO Buku Kapal 6773	Pelanggaran DPI
5	13/02/2025	B.400/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia PAHALA MELIMPAH 8 NO Buku Kapal 10364	Pelanggaran DPI
6	13/02/2025	B.396/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia HASIL MELIMPAH - 5 NO Buku Kapal 8063	Pelanggaran DPI
7	14/02/2025	B.444/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia VICTORY - V NO Buku Kapal 7558	Beroperasi Dekat Garis Pantai
8	14/02/2025	B.445/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia MARIS - III NO Buku Kapal 7553	Beroperasi Dekat Garis Pantai
9	19/02/2025	B.499/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia PUTRA BAHARI PRATAMA - 121 NO Buku Kapal 5126	Pelanggaran DPI
10	19/02/2025	B.504/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia TIEN SUDARMO - 01 NO Buku Kapal 8359	Beroperasi Dekat Garis Pantai
11	21/02/2025	B.541/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia DYNASTI MAKMUR - IA NO Buku Kapal 2573	Pelanggaran DPI
12	24/02/2025	B.551/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia HASIL ANUGRAH MINA NO Buku Kapal 8199	Pelanggaran DPI
13	24/02/2025	B.553/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia MARCEL JAYA 57 NO Buku Kapal 7088	Pelanggaran DPI
14	24/02/2025	B.559/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia KARYA BAHARI SEJAHTERA NO Buku Kapal 10607	Masuk Zona Konservasi
15	24/02/2025	B.560/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia JASA MINA PERSADA NO Buku Kapal 914	Beroperasi Dekat Garis Pantai
16	26/02/2025	B.608/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia BAHARI INDAH - VI NO Buku Kapal 7533	Pelanggaran DPI
17	26/02/2025	B.609/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia PERINTIS JAYA - VII NO Buku Kapal 1723	Pelanggaran DPI
18	26/02/2025	B.610/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia PERINTIS JAYA - 85 NO Buku Kapal 5316	Pelanggaran DPI
19	26/02/2025	B.611/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia AGUNG MAKMUR - 168 NO Buku Kapal 5128	Pelanggaran DPI
20	27/02/2025	B.631/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia SUMBER JAYA - 28 NO Buku Kapal 2734	Pelanggaran DPI
21	27/02/2025	B.632/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia DUTA BAHARI - III NO Buku Kapal 7654	Pelanggaran Pelabuhan
22	05/03/2025	B.729/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia GARUDA MILLENNIUM NO Buku Kapal 2127	Beroperasi Dekat Garis Pantai
23	05/03/2025	B.729/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia GARUDA MILLENNIUM NO Buku Kapal 2127	Pelanggaran DPI
24	05/03/2025	B.732/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia KARYA INDAH 308 NO Buku Kapal 16968	Pelanggaran DPI
25	06/03/2025	B.750/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia STARINDO PRIMA NO Buku Kapal 19640	Pelanggaran DPI
26	13/03/2025	B.843/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia WITA MAKMUR 3 NO Buku Kapal 10283	Pelanggaran DPI
27	13/03/2025	B.836/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia PHOTERI NO Buku Kapal 3591	Pelanggaran DPI
28	13/03/2025	B.837/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia VICTORY BARU NO Buku Kapal 3997	Pelanggaran DPI
29	13/03/2025	B.838/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia WITA MAKMUR I NO Buku Kapal 9851	Pelanggaran DPI
30	13/03/2025	B.838/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia HARAPAN JAYA MAJU NO Buku Kapal 1720	Pelanggaran DPI
31	13/03/2025	B.839/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia ADI JAYA 04 NO Buku Kapal 7765	Beroperasi Dekat Garis Pantai
32	17/03/2025	B.867/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia MUARA INDAH - 3 NO Buku Kapal 6026	Pelanggaran DPI
33	17/03/2025	B.868/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia DINASTI MAKMUR - 03 NO Buku Kapal 6347	Beroperasi Dekat Garis Pantai
34	17/03/2025	B.875/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia AL BARQAH 03 NO Buku Kapal 11126	Pelanggaran Pelabuhan
35	17/03/2025	B.877/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia JAYA MULIA NO Buku Kapal 4739	Pelanggaran DPI
36	17/03/2025	B.878/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia SUMBER NELAYAN 87 NO Buku Kapal 7481	Pelanggaran DPI
37	17/03/2025	B.876/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia DINASTI KARIMUN 18 NO Buku Kapal 7332	Pelanggaran DPI
38	21/03/2025	B.928/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia TEGUH MULYA NO Buku Kapal 9823	Pelanggaran Pelabuhan
39	27/03/2025	B.977/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia PANCA EMAS NO Buku Kapal 1225	Beroperasi Dekat Garis Pantai
40	27/03/2025	B.978/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia SUMBER NELAYAN 268 NO Buku Kapal 10695	Pelanggaran DPI
41	27/03/2025	B.979/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia SOYO MANDIRI NEW 01 NO Buku Kapal 12080	Beroperasi Dekat Garis Pantai



Gambar 8 Ekspose penetapan sanksi administratif

b. IK 10: Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Formula :

$$X_{TLH} = \Sigma \frac{(X_1 + X_2 + X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{TLH} : Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan SDKP;

x_{1+2+n} : Jumlah pelanggaran yang dilakukan tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (SP1, SP2, dan denda administratif) dan bukan pelanggaran

n : Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan

dengan kriteria indeks

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik

Selama triwulan I tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pemeriksaan terhadap 177 dugaan pelanggaran SPKP menurut data pemantauan yang dilakukan oleh tim pusdal. Data dugaan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Pangkalan PSDKP Tual dengan melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda maupun pemilik. Berikut hasil tindak lanjut tersebut kami sampaikan dalam bentuk tabel.

Tabel 20 Rekapitulasi SPKP

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)						ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						CAPAIAN IKU PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF			
		TRANSSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	ZONA KONSERVASI	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DENDA	CAPAIAN KOMPONEN SPKP	CAPAIAN KOMPONEN SELAIN SPKP	RATA-RATA	Kriteria indeks (melihat tabel)
1	Tual	7	18	72	68	12	177	68	109	51	13	3	40	1	1	100%	100%	100%	81
Total		7	18	72	68	12	177	68	109	51	13	3	40	1	1				

$$X_{TLH} = \Sigma \frac{(X1+X2+X)}{n} \times 100\% = \frac{(40+1+1+13)}{109-51-3} \times 100\% = \frac{55}{55} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di atas maka Pangkalan PSDKP tual memperoleh capaian triwulan I sebesar 81 dari target triwulan I yang ditetapkan sebesar 65. Berikut kami sampaikan data capaian indikator kinerja dimaksud dalam bentuk tabel.

Tabel 21 Capaian IK 10

Indikator Kinerja				Target		Realisasi		
				TW I	2025	TW I 2025	s/d TW I	TW I 2024
Indeks	Pemeriksaan	Hasil	Analisis	65	81	81	81	80
Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan								

Analisis penyebab keberhasilan disebabkan antara lain:

1. Pangkalan PSDKP Tual menindaklanjuti dengan melaksanakan BAP kepada pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu;
2. Pangkalan PSDKP Tual memanfaatkan aplikasi online dalam hal ini zoom meeting agar mempermudah proses permintaan keterangan terhadap pemilik yang berdomisili di luar wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual.

Analisa kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja dimaksud adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan tindaklanjut kapal yang diindikasi melakukan pelanggaran. Pangkalan PSDKP Tual secara kontinu terus melakukan pemanggilan klarifikasi maupun berkoordinasi kepada UPT PSDKP lainnya agar proses permintaan keterangan dapat berjalan dengan lancar.

4. Sasaran kinerja 8: Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan

Sasaran kinerja ini menghasilkan satu indikator kinerja utama yaitu "Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan" indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang telah digunakan tahun sebelumnya untuk mengukur capaian kinerja pada kegiatan tindak pidana kelautan dan perikanan akan tetapi pada tahun ini perhitungan akan dilaksanakan setiap triwulan.

a. IK 11: Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II).

$$\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(xa) = \left(\frac{a}{\sum b} \right)$$

- X_a : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
- a : Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari terbitnya surat perintah penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan / atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun diatasnya, kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit
- n : Total kasus penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan ditahun berjalan

Selama triwulan I tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual belum menangani kasus TPKP dikarenakan indikator kinerja ini bersifat kasuistik. Kondisi ini secara otomatis membuat capaian akan sama dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 65.

5. Sasaran kinerja 9: Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran kinerja ini menurunkan 10 indikator kinerja manajerial yang telah ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual dalam perjanjian kinerja Tahun 2025. 10 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian diantaranya;

1. Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
2. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
3. Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks);
4. Penilaian mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
5. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual (%);
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%);
7. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
8. Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
9. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi);
10. Nilai implementasi program budaya kerja (nilai).

Selama kurun waktu triwulan I Pangkalan PSDKP Tual melakukan penilaian terhadap 3 indikator kinerja manajerial yang dinilai secara triwulan yaitu pada point 5, 6, dan 7 sedangkan realisasi seluruh kegiatan dukungan manajemen selama triwulan I sebesar Rp4,282,644,549,- atau sekitar 21,43% dari total pagu Rp19,982,733,000,-

a. IK 16: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan

barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko

b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko

Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pengendalian resiko dan dipantau oleh tim sesdit terkait kelengkapan data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Pangkalan PSDKP Tual **sebesar 100 dari target 100 pada triwulan I tahun 2025** dengan merealisasikan 6 pengendalian risiko dari 6 rencana, dengan perhitungan sebagai berikut

$$X = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian ini dikarenakan seluruh tahapan resiko pada Pangkalan PSDKP Tual telah dilaksanakan dan telah terdokumentasikan serta telah diverifikasi (lampiran II). Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 22 Capaian IK 16

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I 2025	2025	TW I 2025	s/d TW I 2024	TW I 2024
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam triwulan berjalan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;

2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut;

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar evaluasi kegiatan sebelumnya.

b. IK 17: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal. Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) sebanyak **75%** dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\text{Jml Rekomendasi} = (\Sigma N_t) / (\Sigma N) \times 100\%$$

Keterangan:

ΣN_t = Rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2

ΣN = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2

Tabel 23 Capaian IK 17

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2025	TW I 2025	s/d TW I	TW I 2024
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%	95%	100%	100%	100%

Selama triwulan I tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah menyelesaikan 12 tindak lanjut atas 12 rekomendasi yang disampaikan itjen sebagaimana disampaikan dalam surat nomor B.1437/DJPSDKP.1/TU.140/IV/2025 (lampiran III), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Rekomendasi} = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Analisa penyebab keberhasilan yang mendukung capaian ini adalah mendelegasikan pihak yang bertanggung jawab jika terdapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dan pimpinan yang proaktif untuk memantau sejauh mana progress tindak lanjut sudah diselesaikan.

Analisa kegiatan yang menunjang adalah kegiatan monitoring internal setelah rekomendasi disampaikan, yang dipimpin langsung oleh kasubag umum agar tindak lanjut dapat segera disampaikan.

c. IK 18: Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (*tools* SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021. Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan antara lain U1-Persyaratan Layanan⁽¹⁾, U2-Kemudahan Prosedur⁽²⁾, U3-Waktu Penyelesaian⁽³⁾, U4-Kesesuaian Biaya⁽⁴⁾, U5-Kesesuaian Produk⁽⁵⁾, U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas⁽⁶⁾, U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas⁽⁷⁾, U8-Layanan Konsultasi⁽⁸⁾, dan U9-Kualitas Isi/Sarana⁽⁹⁾.

SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pelayanan publik yang ada di Lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Survei kepuasan masyarakat dilakukan kepada pengguna jasa di Pangkalan PSDKP Tual maupun satwas dan wilker selama kurun waktu triwulan I dan

diperoleh nilai 93,22 dari target 88,5 (lampiran IV). Berikut kami sampaikan tabel capaian perhitungan indikator kinerja dimaksud.

Tabel 24 Capaian IK 20

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2025	TW I 2025	s/d TW I 2024	TW I 2024
Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	88,5	88,5	93,22	93,22	100

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;
2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang nyaman;
3. Keterbukaan informasi terkait prosedur penerbitan ataupun kendala yang mengakibatkan SLO tidak dapat diterbitkan disampaikan dengan baik kepada pengguna jasa.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain

1. Perawatan Gedung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa;
2. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan;
3. Internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada para Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K melalui kegiatan apel pagi sehingga memupuk kesadaran dan aktualisasi dalam melaksanakan pelayanan.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola Pangkalan Pengawasan SDKP Tual pada Tahun 2025 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440853/2025 tanggal 12 Desember 2024, mendapat alokasi dana sebesar Rp41,512,621,000,- dengan pagu RM sebesar Rp34,909,456,000,- dan pagu PNPB sebesar Rp6,603,165,000,- Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah memiliki realisasi sebesar Rp5,768,821,190,- atau 13,90% berdasarkan data OMSPAN.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama triwulan I Tahun 2025, kinerja Pangkalan PSDKP Tual telah mencapai hasil yang baik. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pada Tahun 2025, terdapat 21 Indikator Kinerja dimana 11 merupakan IKU dan 10 IKM yang menjadi komitmen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual. Pencapaian IK triwulan I tahun 2025 dengan nilai NKO sebesar 104,79 diperoleh terhadap penilaian 8 Indikator Kinerja, 2 IK berstatus biru (istimewa) 6 IK lainnya berstatus hijau (baik).

B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Pangkalan PSDKP Tual pada periode triwulan II Tahun 2025. Saran dan Rencana untuk memperbaiki capaian IKU pada Tahun 2025 terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 25 Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual Periode Triwulan I 2025

No	Saran	Rencana Aksi	Waktu
1	Melaksanakan kontrol terhadap capaian IK IP ASN	• Mengadakan kroscek data berdasarkan capaian IP ASN pada aplikasi berbasis web. • Melakukan penyampaian melalui WAG agar setiap pegawai dapat memenuhi kewajiban dalam pemenuhan IP ASN	• Triwulan II
2	Melaksanakan kontrol terhadap capaian IKPA Pangkalan PSDKP Tual	• Melakukan rapat evaluasi	• Triwulan II

PANGKALAN PSDKP TUAL

Jalan Bukit Dumar No.1 Kompleks PPN Tual
Kota Madya Tual Kecamatan Dullah Selatan
Provinsi Maluku - 97611



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Bintoro
Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual

Pung Nugroho Saksono

Sigit Bintoro

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		3. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7. Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	71,5

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	92
		14. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	81
		15. Penilaian Mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	86
		16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
		17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	88,5
		19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	80
		20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	1
		21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	19.363.404.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	256.615.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.809.869.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	100.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	19.982.733.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025		41.512.621.000

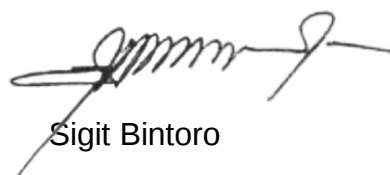
Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual



Sigit Bintoro



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erik Sostenes
Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

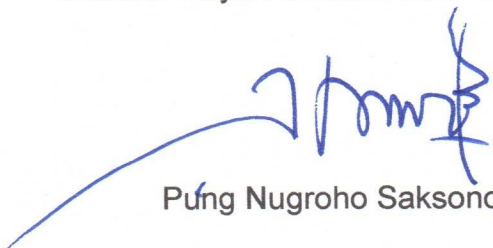
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

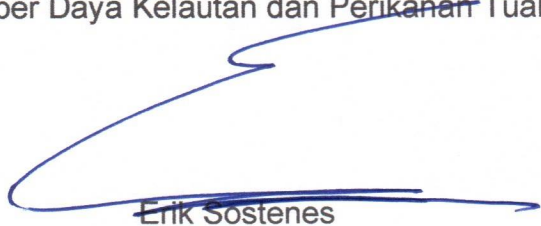
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual


Pung Nugroho Saksono


Erik Sostenes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		3. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7. Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	71,5
		13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	92

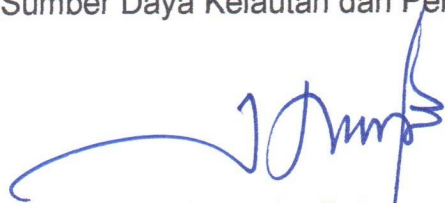
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	81
		15. Penilaian Mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	86
		16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
		17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	88,5
		19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	80
		20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	1
		21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	19.363.404.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	256.615.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.809.869.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	100.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	19.982.733.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025		41.512.621.000

Jakarta, 17 Maret 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual



Erik Sostenes



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

Nomor : B.1477/PSDKP.1/OT.710/IV/2025 14 April 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian
Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan I
Tahun 2025 Lingkup Ditjen. PSDKP

Yth.

1. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
 2. Kepala UPT Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
- di
Jakarta

Bersama ini disampaikan Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sebagaimana terlampir untuk mendapat perhatian pada pelaksanaan realisasi atas rencana pengendalian risiko pada Triwulan I Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Suharta

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

**LAPORAN PERSENTASE HASIL CAPAIAN
PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN
BERBASIS MANAJEMEN RISIKO**

DIREKTORAT JENDERAL PSDKP TRIWULAN I TAHUN 2025

Nomor : B.1477/PSDKP.1/OT.710/I/V2025
Tanggal : 14 April 2025

RINGKASAN

Persentase capaian hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Triwulan I Tahun 2025 diperoleh dari Evaluasi Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) TA 2024 dengan tujuan untuk: 1) memastikan manajemen risiko telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016; 2) memastikan pemanfaatan manajemen risiko dalam pengendalian kebijakan dan kegiatan; 3) memastikan pemantauan terhadap aktivitas respon manajemen risiko; dan 4) memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan manajemen risiko.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dalam pelaksanaan manajemen risiko, yaitu: 1) Proses penyusunan identifikasi risiko belum sepenuhnya dapat mengantisipasi risiko secara efektif dan efisien; 2) Pengendalian rutin belum sepenuhnya di dukung dengan bukti pengendalian; 3) Pengendalian berkala belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk bahan pengambilan kebijakan oleh Kepala Satker/Eselon I; 4) Aktivitas/kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko belum sepenuhnya efektif; dan 5) Substansi pelaporan penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya memadai.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Ketua Satgas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP agar meningkatkan pengendalian dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Melengkapi data dukung SOP atau bagan arus (*flow chart*) proses bisnis dari aktivitas/kegiatan yang menjadi obyek penilaian risiko untuk kegiatan yang dikendalikan dengan pendekatan manajemen risiko; 2) menginstruksikan pemilik risiko untuk selalu melakukan *monitoring* dan evaluasi atas rencana pengendalian yang telah ditetapkan; 3) menginstruksikan Tim Satgas SPIP dan Tim SPIP Satker lingkup Ditjen PSDKP agar lebih cermat dalam memverifikasi kelengkapan dan keakuratan data pengendalian rutin, berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko; 4) menginstruksikan seluruh pemilik risiko untuk melaksanakan kegiatan pengendalian berdasarkan rencana pengendalian kegiatan/aktivitas yang telah dibuat dan menyampaikan dokumen pelaksanaan kepada Tim SPIP; 5) melaksanakan pemantauan tindak lanjut terhadap seluruh usulan perbaikan atas sisa risiko dari aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan pada Triwulan III TA. 2024; dan 6) melaksanakan koreksi berjenjang dalam rangka penjaminan kualitas laporan penyelenggaraan SPIP. Persentase capaian hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Triwulan I Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP adalah 100% (seratus persen).

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I INFORMASI UMUM.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	1
D. Batasan	1
BAB II HASIL.....	3
Persentase Hasil Capaian	3

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perhitungan persentase pengendalian kegiatan berbasis MR	3
---	---

BAB I INFORMASI UMUM

A. Dasar Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pengendalian dengan Pendekatan Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN-KP/2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Tujuan

1. Memastikan manajemen risiko telah disusun sesuai dengan Permen KP Nomor 10 Tahun 2016;
2. Memastikan pemanfaatan manajemen risiko dalam pengendalian kebijakan dan kegiatan;
3. Memastikan pemantauan terhadap aktivitas respon manajemen risiko terealisasi;
4. Realisasi atas rencana pengendalian risiko dapat meminimalisasi risiko dan memberikan perbaikan terhadap pelaksanaan manajemen risiko.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Seluruh Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, yaitu:

1. 1 (satu) Satuan Kerja Pusat; dan
2. 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. Batasan Perhitungan

1. Masa yang dievaluasi : Januari s.d. Maret 2025
2. Waktu Pelaksanaan Perhitungan : Februari s.d. 11 April 2025
3. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dihitung dengan formula, sebagai berikut:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis MR

a = Identifikasi Risiko

b = Pemantauan Pengendalian Risiko

4. Kebenaran data dan informasi yang diberikan menjadi tanggung jawab Satker.

BAB II

HASIL PENILAIAN

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada Tabel. 1 berikut:

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	4	4	100%
	Direktorat POA	12	12	100%
	Direktorat PPSPDP	8	8	100%
	Direktorat PPSPDK	10	10	100%
	Direktorat PP	12	12	100%
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	3	3	100%
3	Pangkalan PSDKP Batam	7	7	100%
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	18	18	100%
5	Pangkalan PSDKP Benoa	4	4	100%
6	Pangkalan PSDKP Bitung	23	23	100%
7	Pangkalan PSDKP Tual	6	6	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	9	9	100%
9	Stasiun PSDKP Cilacap	12	12	100%
10	Stasiun PSDKP Kupang	4	4	100%
11	Stasiun PSDKP Pontianak	15	15	100%
12	Stasiun PSDKP Tarakan	7	7	100%
13	Stasiun PSDKP Tahuna	8	8	100%
14	Stasiun PSDKP Ambon	8	8	100%
15	Stasiun PSDKP Biak	5	5	100%
Total		175	175	100%

Selanjutnya disampaikan bahwa perhitungan persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko ini dilakukan secara terbatas pada informasi yang tertuang di dalam dokumen pemantauan pengendalian risiko yang disampaikan. Adapun kebenaran dan keabsahan informasi tersebut menjadi tanggung jawab pemilik risiko.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Suharta



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

Nomor : B.1437/DJPSDKP.1/TU.140/IV/2025 11 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Penyampaian Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja" Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2025

Yth. Pejabat (daftar terlampir)

Di tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode Triwulan I Tahun 2025 khususnya capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP", berikut ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d 31 Desember 2024 (Triwulan IV 2024) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II pusat dan unit pelaksana teknis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.
2. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 397/ITJ.0/TU.140/IV/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan I Tahun 2025, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan I Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar **100.00% (tuntas 143 rekomendasi dari 143 rekomendasi)**.
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Ditjen PSDKP disampaikan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Suharta

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

Lampiran I Surat Dinas

Nomor :B.1437/DJPSDKP.1/TU.140/IV/2025

Tanggal :11 April 2025

Daftar Penerima

1. Direktur Pengendalian Operasi Armada, Ditjen PSDKP;
2. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP;
3. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP;
4. Direktur Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP;
5. Ketua Tim Kerja Program, Ditjen PSDKP;
6. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Umum, Ditjen PSDKP;
7. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, Ditjen PSDKP;
8. Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Ditjen PSDKP;
9. Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta, Ditjen PSDKP;
10. Kepala Pangkalan PSDKP Benoa, Ditjen PSDKP;
11. Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Ditjen PSDKP;
12. Kepala Pangkalan PSDKP Tual, Ditjen PSDKP;
13. Kepala Stasiun PSDKP Cilacap, Ditjen PSDKP;
14. Kepala Stasiun PSDKP Belawan, Ditjen PSDKP;
15. Kepala Stasiun PSDKP Kupang, Ditjen PSDKP;
16. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Ditjen PSDKP;
17. Kepala Stasiun PSDKP Tarakan, Ditjen PSDKP;
18. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna, Ditjen PSDKP;
19. Kepala Stasiun PSDKP Ambon, Ditjen PSDKP;
20. Kepala Stasiun PSDKP Biak, Ditjen PSDKP.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Suharta

Lampiran II Surat Dinas

Nomor :B.1437/DJPSDKP.1/TU.140/IV/2025

Tanggal :11 April 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU

“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP” Triwulan I Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	41	41	100.00	0	0
2	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	0	0	-	0	-
3	Direktorat Pengawasan SDK	0	0	-	0	-
4	Direktorat Pengawasan SDP	0	0	-	0	-
5	Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	-	0	-
6	Pangkalan PSDKP Lampulo	2	2	100.00	0	0
7	Pangkalan PSDKP Batam	0	0	-	0	-
8	Pangkalan PSDKP Jakarta	0	0	-	0	-
9	Pangkalan PSDKP Benoa	11	11	100.00	0	0
10	Pangkalan PSDKP Bitung	20	20	100.00	0	0
11	Pangkalan PSDKP Tual	12	12	100.00	0	0
12	Stasiun PSDKP Cilacap	11	11	100.00	0	0
13	Stasiun PSDKP Belawan	22	22	100.00	0	0
14	Stasiun PSDKP Kupang	10	10	100.00	0	0
15	Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100.00	0	0

16	Stasiun PSDKP Tarakan	6	6	100.00	0	0
17	Stasiun PSDKP Tahuna	7	7	100.00	0	0
18	Stasiun PSDKP Ambon	0	0	-	0	-
19	Stasiun PSDKP Biak	0	0	-	0	-
Total		143	143	100.00	0	0

*Note: untuk satuan kerja yang tidak memiliki rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen KKP, pengisian capaian IKU menggunakan nilai minimal yaitu 95%

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 397/ITJ.0/TU.140/IV/2025

Yth. : 1. Para Sekretaris Ditjen lingkup KKP
2. Para Sekretaris Badan lingkup KKP
3. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan I Tahun 2025

Lampiran : Satu Berkas

Tanggal : 10 April 2025

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan I Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2025 (Triwulan I Tahun 2025).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan I Tahun 2025 lingkup KKP sebesar 92,39% (tuntas 911 dari 986 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:
Inspektur Jenderal

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 397/ITJ.0/TU.140/IV/2025

Tanggal : 10 April 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk
Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Periode Triwulan I Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	41	40	97,56%	1	2,44%
2	Ditjen PKRL	88	78	88,64%	10	11,36%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	118	86	72,88%	32	27,12%
4	Ditjen PSDKP	143	143	100,00%	0	0,00%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	210	195	92,86%	15	7,14%
6	BPPSDMKP	171	155	90,64%	16	9,36%
7	Ditjen PDSPKP	102	102	100,00%	0	0,00%
8	BPPMHKP	105	104	99,05%	1	0,95%
9	Itjen	8	8	100,00%	0	0,00%
TOTAL		986	911	92,39%	75	7,61%

Catatan:

Sehubungan dengan adanya pemecahan unit kerja (reorganisasi) Ditjen PKRL menjadi Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan, capaian tindak lanjut hasil pengawasan Triwulan I dari kedua unit eselon I tersebut dapat menggunakan capaian Ditjen PKRL dalam hal diperlukan untuk pengukuran kinerja.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
 LAMAN www.kkp.go.id, SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

Nomor : B.1445/DJPSDKP.1/HP.430/IV/2025 14 April 2025
 Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Ditjen PSDKP Triwulan I
 Tahun 2025

Yth. 1. Direktur Pengendalian Operasi Armada
 2. Kepala UPT Lingkup Ditjen. PSDKP

di_ _____
 Tempat _____

Sehubungan dengan pengukuran indikator kinerja SKM Ditjen PSDKP Triwulan I 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil validasi SKM Ditjen PSDKP yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025. Penghitungan penilaian dilakukan setiap triwulan dengan menggunakan aplikasi **Susan KKP** melalui laman <https://ptsp.kkp.go.id/skm/p/home>. Hasil capaian SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) Direktorat Jenderal PSDKP, sebagai berikut:

NO	UPP	TW IV	Responden	Nama Produk Layanan
1.	Direktorat POA	95.35	104	1. Pemberian Akses Pemantauan Perikanan 2. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter 3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan
2.	Pangkalan PSDKP Lampulo	93.70	15	Surat Laik Operasi
3.	Pangkalan PSDKP Batam	83,91	97	Surat Laik Operasi
4.	Pangkalan PSDKP Jakarta	95.33	41	Surat Laik Operasi
5.	Pangkalan PSDKP Benoa	88.66	122	Surat Laik Operasi
6.	Pangkalan PSDKP Bitung	92.65	68	Surat Laik Operasi
7.	Pangkalan PSDKP Tual	93.22	43	Surat Laik Operasi
8.	Stasiun PSDKP Cilacap	89.37	69	Surat Laik Operasi
9.	Stasiun PSDKP Belawan	83.18	54	Surat Laik Operasi

10.	Stasiun PSDKP Kupang	97.55	151	Surat Laik Operasi
11.	Stasiun PSDKP Pontianak	92.55	139	Surat Laik Operasi
12.	Stasiun PSDKP Tarakan	90.92	56	Surat Laik Operasi
13.	Stasiun PSDKP Tahuna	91.67	15	Surat Laik Operasi
14.	Stasiun PSDKP Ambon	94.82	59	Surat Laik Operasi
15.	Stasiun PSDKP Biak	99.38	67	Surat Laik Operasi

2. Berdasarkan hasil SKM diatas, kami sampaikan:
- Nilai SKM Direktorat Jenderal PSDKP setelah dikonversi memperoleh nilai **92.24** dengan mutu pelayanan kategori “ **Sangat Baik**”; dengan jumlah responden 1100.
 - Produk Layanan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI) sudah tidak lakukan lagi di masing-masing UPP mulai di di TW I Tahun 2025.
 - Apresiasi kepada seluruh UPP karena telah mencapai target atas kontribusi terhadap pencapaian sampai dengan triwulan I Tahun 2025;
 - Membuat laporan SKM beserta rencana tindak lanjutnya dan data dukungnya untuk diupload di Aplikasi SUSAN KKP.
 - Agar mempertahankan dan/atau meningkatkan hasil capaian pada periode triwulan berikutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Suharta

Tembusan:

- Direktur Jenderal PSDKP;
- Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Sekjen KKP;
- Inspektur II, Itjen KKP.



Siyam Penghargaan

NOMOR : B.399/MEN-KP/III/2025

Diberikan Kepada:

*Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*

Sebagai

Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Kategori Baik
pada Penilaian Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan
oleh Kementerian PANRB Tahun 2024

Jakarta, 11 Maret 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

79.82